

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985).

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa perubahan di sektor pembangunan ekonomi, di mana tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus menerus selama lebih-kurang 32 di masa pemerintahan Orde Baru belum mampu membangun basis ekonomi rakyat yang tangguh.

Perlu pula disadari bahwa proses percepatan pembangunan yang terlalu menitik-beratkan pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dimbangi dengan pemerataan pendapatan untuk membangun ekonomi rakyat, maka misi pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan terabaikan sehingga basis ekonomi rakyat (nasional) mengalami kegoncangan bahkan rapuh. Kerapuhan basis ekonomi rakyat mulai nampak pada saat bangsa Indonesia memasuki era tinggal landas atau Pembangunan Jangka Panjang Kedua

(PJP II) yang ditandai dengan munculnya krisis multi-dimensional, yang diawali dengan krisis ekonomi dan moneter pada awal tahun 1997 sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan dimulai dengan memasuki Era Reformasi.

Dengan adanya krisis ekonomi dan moneter, maka terjadi kelumpuhan ekonomi nasional terutama di sektor riil yang berakibat terjadinya PHK besar-besaran dari perusahaan-perusahaan swasta nasional. Hal ini berujung pada munculnya pengangguran di kota-kota besar, termasuk Kota Manado sebagai obyek penelitian ini.

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, kota Manado merupakan kota perdagangan adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran (selain yang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang kaki lima.

Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga

kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Lepas dari beberapa keunggulan yang dimiliki kelompok usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan di atas, namun hasil pra-survei menunjukkan bahwa dari 1.117 orang pedagang kaki lima yang tersebar di 12 (dua belas) lokasi pasar senggol yang ada di Kota Manado, ternyata memperoleh pendapatan rata-rata per-tahun masih tergolong rendah. Indikasi rendahnya tingkat pendapatan mereka dapat ditelusuri melalui kepemilikan rumah

tinggal, di mana sebagian besar masih mengontrak rumah, bahkan ada di antara mereka yang masih tinggal di rumah keluarga.

Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa kondisi ini diduga bersumber dari dua hal pokok, yaitu (1) faktor internal kelompok pedagang kaki lima itu sendiri; dan (2) faktor eksternal, yakni kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima). Masalah yang berkaitan dengan faktor internal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam berusaha; perilaku konsumtif (konsumerisme), kebanyakan dari mereka belum mempunyai modal sendiri (sumber modal sebagian dari rentenir, dan sebagian dari barang-barang yang dijajakan adalah barang-barang komisi). Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima yang hingga saat ini baru sebagian kecil saja yang telah memperoleh pembinaan pihak-pihak terkait dari 1.117 orang usaha kecil, termasuk pedagang kaki lima yang ada di Kota Manado. Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan masalah pemberdayaan sektor informal, khususnya pengelolaan pedagang kaki lima, yakni masalah pengelolaan unsur manusia (pelatihan), pengelolaan unsur uang (modal kerja) dan pengelolaan unsur metode (manajemen usaha) dalam upaya meningkatkan pendapatan guna memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di samping itu, adanya dugaan bahwa tingkat pendapatan kelompok pedagang kaki lima yang bergerak di sektor pangan (makanan masak), seperti mie,

bakso, coto, konro dan lain-lain, lebih tinggi dibanding kelompok pedagang kaki lima yang bergerak di sektor sandang/pakaian dan barang-barang kelontong

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian mengenai pemberdayaan sektor informal, yang berkaitan dengan studi tentang pengelolaan kelompok pedagang kaki lima dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD di Kota Manado, penting untuk dilakukan.

## B. Perumusan Masalah

Beranjak dari indentifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Sejuahmana pengaruh pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dari aspek pemnerian pendidikan dan latihan (pelatihan) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado ?.
- 2) Apakah pemberian bantuan modal sebagai salah satu aspek pemberdayaan PKL punya pengaruh terhadap penerimaan PAD Kota Manado ?.
- 3) Sejuahmana pula pengaruh pemberdayaan PKL dari aspek cara-cara mengolah usaha terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado ?.
- 4) Sejuahmana pengaruh pendapatan atau penghasilan (profit usaha) pedagang kaki lima terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado ?.

- 5) Seberapa besar pengaruh secara simultan aspek-aspek pemberdayaan PKL, seperti pemberian pendidikan dan latihan (pelatihan), bantuan modal, cara-cara mengolah usaha dan pendapatan atau penghasilan (profit) usaha pedagang kaki lima terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado ?.

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dari aspek pemnerian pendidikan dan latihan (pelatihan) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.
- 2) Untuk menganalisis apakah pemberian bantuan modal sebagai salah satu aspek pemberdayaan PKL punya pengaruh terhadap penerimaan PAD Kota Manado.
- 3) Untuk menjelaskan pengaruh pemberdayaan PKL dari aspek cara-cara mengolah usaha terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
- 4) Untuk mengkaji sejauhmana pengaruh pendapatan atau penghasilan (profit usaha) pedagang kaki lima terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

5) Untuk mengukur besarnya pengaruh secara simultan aspek-aspek pemberdayaan PKL, seperti pemberian pendidikan dan latihan (pelatihan), bantuan modal, cara-cara mengolah usaha dan pendapatan atau penghasilan (profit) usaha pedagang kaki lima terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.

## 2. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian diharapkan bermanfaat ganda. Di satu sisi, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah hasanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia dan di sisi lain, secara praktis, hasil penelitian ini memberi kontribusi bagi pihak-pihak terkait, seperti Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, Dinas Pasar, BUMN dan lain-lain dalam upaya memberdayakan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan pendapatan (profit) usaha, sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi guna memacu penyelenggaraan otonomi daerah.